

DAMPAK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (KLU)

L. Fathurrahman

Universitas 45 Mataram

Email: laluatung@gmail.com

Abstrak

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai sejak Juli 2005, telah berperan memajukan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Mulai Tahun 2009, pemerintah mengembangkan peran BOS dari perluasan ditambah peningkatan kualitas. Penelitian ini ingin mengetahui realisasi Program BOS dan dampaknya terhadap: a. beban pembiayaan orang tua murid; b. peningkatan kualitas pembelajaran; c. penanggulangan siswa putus sekolah, di Kabupaten Lombok Utara. Beban biaya pendidikan orang tua dilihat dari jenis, jumlah, dan sifat penarikan dana. Peningkatan kualitas hasil belajar dilihat dari peningkatan kelulusan dan kenaikan nilai hasil ujian nasional tiga tahun terakhir. Selanjutnya penanggulangan putus sekolah dilihat dari jumlah, sebab-sebab dan upaya penanggulangannya dengan bantuan biaya dana BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif *expos facto*, dilakukan pada SD//MI, SMP/MTs, dan Madrasah Salafiyah Ula/ Wusthodi tiga kecamatan yaitu Tanjung, Kayangan, dan Bayan mewakili Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan pertimbangan purposive, ditetapkan sekolah sampel dengan kluster sumber data yang terdiri dari: 1. kepala sekolah 17 orang; 2. guru 34 orang; 3. pengurus komite/ yayasan 16 orang; 4. pengawas 8 orang; 5. siswa aktif 20 orang; 6. siswa putus sekolah 23 orang; 7. wali siswa aktif 20 orang; 8. Wali siswa putus sekolah 17 orang; 9. kepala UPTD Pendidikan 3 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 172 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan program BOS pada SD/MI, SMP/MTs, dan Madrasah Salafiyah Ula/ Wustho telah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013; 2. Program BOS telah dirasakan manfaatnya pada SD/MI, SMP/MTs, Madrasah Salafiyah Ula/Wustho; 3. Program dana BOS pada SD/MI, SMP/Mts, Madrasah Salafiyah Ula/Wustho membantu mengurangi beban pembiayaan pendidikan oleh masyarakat orang tua murid; 4. Dampak Dana BOS pada SD/MI, SMP/Mts, dan Madrasah Salafiyah Ula/ Wustho untuk peningkatan kualitas pendidikan nampak pada penyediaan sarana prasarana dan alat bantu pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan upaya peningkatan kualitas siswa; 5. Tetapi dampak bantuan dana BOS belum nampak pada peningkatan hasil belajar dan pada penanggulangan drop out pada siswa SD/MI, SMP/MTs, Madrasah Salafiyah Ula/ Wustho. Berdasarkan temuan di atas direkomendasikan beberapa perbaikan yaitu: 1. Pemerintah perlu mengatasi kelambatan penerimaan dana BOS; 2. Kepala sekolah perlu meningkatkan alokasi dana BOS menunjang kualitas proses pembelajaran, penanggulan siswa putus sekolah, meningkatkan penggunaan metode pembelajaran; 3. Pemerintah kabupaten terutama instansi pendidikan agar turut serta membina penanggulangan siswa putus sekolah.

Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah, kualitas pendidikan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara sistematis sejak awal REPELITA I Tahun 1969. Program pembangunan meliputi pemerataan, peningkatan kualitas, relevansi, dan efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Realisasi dari tanggung jawab pemerintah berkembang dalam berbagai model dan yang terakhir dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk lembaga pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah

Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (Mts) serta sederajat. Tanggung jawab masyarakat dan orang tua dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan ke sekolah atau bentuk pungutan kepada orang tua murid melalui organisasinya di sekolah yaitu POM, berubah menjadi BP3, kemudian menjadi bernama SPP saat bantuan dipungut dari orang tua dan bernama DPP saat dana pungutan dari orang tua tersebut disalurkan kembali ke sekolah yang bersangkutan, dan yang terakhir berubah lagi menjadi pungutan melalui Komite Sekolah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pendanaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 9 tahun meliputi biaya operasional non-personalia yaitu biaya bahan atau peralatan habis pakai dan biaya sarana prasarana penunjang terdiri dari daya, air, telephone, pemeliharaan, konsumsi, lembur, transportasi, pajak, dan penunjang lainnya (Permendikbud No, 76, 2012). Kebijakan dana BOS diberlakukan sejak Tahun 2005 termasuk pada wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan kabupaten baru dari pecahan Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga, Kayangan dan Bayan, dengan jumlah penduduk 200.072 orang (KLU, 2001), berbatasan wilayah utara-selatan dengan Kabupaten Lombok-Barat. Hasil pembangunan pendidikan saat ini mencapai jumlah lembaga pendidikan dasar SD/MI sebanyak 135/33 buah, SMP/MTs sebanyak 16/45 buah, dan pendidikan Salafiyah Ula/ Wustho masing-masing satu buah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan bantuan dana BOS di Kabupaten Lombok Utara berlangsung sejalan dengan upaya pada kabupaten / kota lain di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan sedikitnya menyangkut dua hal yaitu kualitas proses dan output pendidikan. Kualitas proses pendidikan menyangkut kualitas komponen kegiatan proses pembelajaran yaitu sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, kurikulum dan bahan sesuai standar fungsional efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kualitas output pendidikan menyangkut keberhasilankelangsungan pendidikan anak didik pada tingkat, jenjang dan jenisnya. Pelaksanaan bantuan dana BOS yang telah berlangsung lama dan diharapkan berdampak untuk menghilangkan beban masyarakat orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan sehingga perlu dilakukan studi/ penelitian evaluasi keberhasilan dampak tersebut.

Studi dampak bantuan dana BOS di Nusa Tenggara Barat telah dilakukan di Kota Mataram. Hasil studi menunjukkan: 1. Jika dilihat dari biaya per siswa per tahun, pemenuhan biaya pendidikan SD/MI melalui dana BOS di Kota Mataram belum mencapai ketersediaan ideal pembiayaan; 2. Telah diupayakan peningkatan kualitas pembelajaran namun belum optimal; 3. Dari sisi metode jalur menurut statistik, secara langsung pembiayaan dari dana BOS mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas UASBN yaitu 37,5% , tetapi upaya peningkatan kualitas secara tidak langsung yaitu melalui jalur kepala sekolah tidak berpengaruh signifikan.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara harus dilanjutkan. Untuk itu sangat penting didukung informasi detail seperti di Kota Mataram tentang realisasi dan dampak dana BOS, pembiayaan pendidikan, beban orang tua, putus sekolah, kualitas pendidikan, dan berbagai informasi terkait lainnya. Oleh karena itu studi evaluasi dampak dana BOS di Kabupaten Lombok Utara sangat perlu dilaksanakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara?.
2. Apakah bantuan Biaya operasional Sekolah (BOS) berpengaruh terhadap penanggulangan siswa drop out (DO) atau putus sekolah pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di kabupaten Lombok Utara?.
3. Apakah bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh terhadap kualitas dan hasil proses pembelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara?.

4. Apakah bantuan biaya Operasional Sekolah (BOS) dapat mengurangi beban orang siswa dalam pembiayaan pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat seperti Madrasah Salafiyah di Kabupaten Lombok Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi gambaran empiris pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, penanggulangan drop out, dan meringankan beban orang tua siswa pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil studi/penelitian ini berbagai pihak antara lain:

1. Hasil studi/penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya hasanah informasi ilmu pengetahuan tentang kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk berbagai kepentingan studi dan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan pendidikan terutama oleh masyarakat orang tua siswa, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Hasil studi penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan kebijakan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara khusus menyangkut pengelolaan, pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat orang tua siswa, peningkatan kualitas pendidikan termasuk penanggulangan siswa drop out sekolah dan berbagai kebijakan pendidikan lainnya baik untuk pemerintah pusat, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Lombok Utara.
3. Bagi kepala sekolah, orang tua siswa, dan siswa sendiri sangat bermanfaat untuk kepentingan pembinaan penyelenggaraan pendidikan sehari-hari baik menyangkut pengelolaan dana BOS, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembebanan pembiayaan pendidikan terhadap orang tua siswa, usaha penanggulangan drop out sekolah,

1.5. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Kondisi geografis dan sosial ekonomi Kabupaten Lombok Utara.
2. Kondisi lembaga pendidikan dasar meliputi SD/MI, SMP/MTs, Madrasah Salafiyah sederajat.
3. Pembiayaan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, Madrasah Salafiyah, meliputi sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana BOS ataupun yang lain, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, orang tua murid, dan masyarakat lainnya.
4. Pengelolaan bantuan dana BOS meliputi jumlah, penerimaan, petunjuk penggunaan dan substitusi beban orang tua siswa dalam penanggulangan putus sekolah.
5. Kualitas pendidikan meliputi:
 - a. Kualitas proses pembelajaran.
 - b. Nilai hasil belajar meliputi nilai USBN/UN dan tingkat kelulusan dalam tiga tahun terakhir.
 - c. Ketidakberlanjutan pendidikan atau drop out, mulai kelas I sampai kelas VI SD/MI dan kelas VII sampai IX pada SMP/MTs serta sederajat.

Masing-masing lingkup di atas akan dikaji secara empiris berdasarkan data primer dan data sekunder dari sumber-sumber yang diperlukan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Peranan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat menentukan kelangsungan kehidupan suatu bangsa karena sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan bangsa. Produktifitas suatu bangsa dalam menyangga keberlangsungannya tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia tersebut ditentukan oleh penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pembangunan pendidikannya dalam rangka penyediaan sumber daya manusia berkualitas secara sistematis sejak Repelita I Tahun 1969. Dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan tersebut disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dimana sebagian kewenangan diserahkan menjadi otonomi pemerintahan daerah. Sehingga pembangunan

pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

2.2. Perkembangan Pembangunan Pendidikan

Perkembangan pendidikan berkualitas suatu bangsa diperlukan dukungam ekonomi yang akan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikannya. Sebuah institusi pendidikan berkualitas membutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang cukup dan layak serta guru yang memiliki kompetensi memadai. Untuk mendukung pembangunan pendidikan pemerintah Indonesia konstitusional telah menetapkan mengalokasikan 20% dana APBN yang diharapkan akan dapat memacu mengejar ketertinggalan pendidikan.

Sejak Orde Baru, program pembangunan pendidikan diarahkan menuju Perluasan Kesempatan Belajar, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterkaitan Pendidikan Dengan Masyarakat, dan Pengelolaan Pendidikan Secara Efektif dan Efisien. Perluasan kesempatan belajar menginginkan penyerapan penduduk usia sekolah minimal 7 tahun sebanyak mungkin terserap pada lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu wujud perluasan kesempatan belajar adalah penerapan Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun terhadap penduduk usia 7 – 12 Tahun untuk mengikuti pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/ MTs. Peningkatan kualitas pendidikan menyangkut proses dan hasil pendidikan. Proses pendidikan berkualitas adalah proses pendidikan yang didukung kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, sarana prasarana, siswa, bahan, dan lingkungan pendidikan yang layak dan memenuhi persyaratan. Kualitas hasil pendidikan menyangkut keluaran pendidikan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut atau secara fungsional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada tingkat jenjang dan jenis pendidikan yang diselesaikannya. Keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat menyangkut isi pendidikan yang perlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan. Selanjutnya pengelolaan pendidikan harus mampu mewujudkan tujuannya sebagaimana yang diharapkan tanpa pemborosan.

Pada lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan pembangunan pendidikan secara nasional diarahkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi termasuk pada Kabupaten Lombok Utara meliputi: rendahnya kualitas, besarnya jumlah buta aksara, dan tingginya angka drop out. Rendahnya kualitas pendidikan yang berkaitan erat dengan: 1. Tenaga pendidik; 2. Peserta didik; 3. sarana prasarana pendidikan; 4. Strategi dan metode pembelajaran; serta 5. Manajemen pengelolaan sekolah. Permasalahan pendidikan tersebut terus diusahakan untuk dituntaskan melalui berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan.

2.3. Pembiayaan Pendidikan

Sebelum Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan, anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD sangat sedikit sekali yaitu berkisar antara 6-8%. Diantara negara-negara di dunia anggaran ini termasuk terkecil. Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pendidikan diperkirakan menjadi salah satu sumber rendahnya kualitas pendidikan. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Sistem Pendidikan tersebut perubahan mendasar terjadi dimana ditetapkan bahwa pembiayaan pendidikan harus dialokasikan sedikitnya sebesar 20% APBN dan 20% APBD baik pada APBD provinsi maupun kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang dasar 1945. Upaya mewujudkan ketetapan Undang-Undang tersebut tidak serta merta, usaha pencapaian 20% tersebut tetap berjalan bertahap. Bahkan upaya percepatan dilakukan melalui penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu yudicial review pasal 49 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dengan keputusannya nomor 011/PUU-11/2005 tanggal 5 Oktober 2005.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah sejak sekitar Tahun 2000 sebagian urusan pemerintahan termasuk bidang pendidikan didesentralisasikan ke kabupaten/ kota, sehingga mempengaruhi pola pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat yang menerapkan beberapa model penyaluran. Model-model tersebut antara lain: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat; 2. Dana Alokasi Umum atau DAU yang langsung ke kabupaten/ kota; 3. Dana yang langsung ke kabupaten kota atau sekolah, yang dapat berbentuk Dana Alokasi Khusus atau DAK. bantuan langsung, blok grand, dan Imbal Swadaya. Pembiayaan pendidikan

oleh pemerintah pusat berkaitan dengan tanggung jawab kewenangannya antara lain penentu kebijakan dan standar pendidikan, penyelenggaraan pendidikan karakter, dan pengendalian kualitas pendidikan. Disamping pembiayaan oleh pemerintah pusat, pembiayaan juga dialokasikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Meskipun pembiayaan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota tersedia, biaya dari masyarakat juga tetap berjalan termasuk masyarakat orang tua murid. Sejak berlakunya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pembiayaan dari masyarakat orang tua murid pada SD/MI, SMP/MTs dan setingkat ditiadakan tetapi secara nyata bantuan masyarakat orang tua murid masih diperlukan.

Sejak Juli Tahun 2005 bantuan pemerintah pusat ditetapkan dengan Model dana Bantuan Operasional Sekolah disingkat BOS yang merupakan penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs sederajat sebagai pelaksana Wajib Belajar 9 Tahun. Meskipun untuk pembiayaan non personalia tetapi pada pembiayaan beberapa jenis investasi dan personalia dana BOS diperbolehkan. Dalam perkembangannya ternyata Dana BOS sangat berperan dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sehingga sejak Tahun 2009 Dana Bos mulai diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini berarti Dana Bos tidak hanya digunakan untuk sarana dan prasarana tetapi mulai dapat digunakan untuk program akademik seperti peningkatan metode dan strategi proses pembelajaran.

2.4. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

Program BOS merupakan model bantuan pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat ke sekolah dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang pada umumnya bertujuan meringankan beban masyarakat terutama orang tua murid. Secara khusus bantuan Dana BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs sederajat; 2. Membebaskan seluruh siswa miskin dari segala bentuk beban pungutan pembiayaan pendidikan pada SD/MI dan SMP/MTs sederajat baik negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa sekolah swasta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan penggunaan dana BOS meliputi:

1. Pembelian/ Penggandaan buku teks pelajaran yaitu untuk mengganti yang rusak atau memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut seperti foto copy, konsumsi panitia, dan uang lembur.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, persiapan ujian, olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, UKS, dan sejenisnya.
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa, honorarium baik pembiayaan persiapan maupun pelaksanaan.
5. Pembelian bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, kertas, pensil dan lain-lain.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa yaitu listrik air dan telephone, internet, modem, termasuk biaya pemasangan baru, pengadaan genset bila belum ada sambungan listrik.
7. Pembiayaan perawatan sekolah.
8. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer termasuk tenaga administrasi.
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/ MGMP, dan KKKS/ MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh bantuan Block Grant, penggunaan dana BOS untuk KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperbolehkan.
10. Pemberian bantuan seragam, sepatu, alat tulis dan bantuan biaya transportasi untuk siswa yang menerima bantuan siswa miskin. Bahkan bila dipandang perlu dan lebih ekonomis dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyebrangan, dan lain sebagainya.

11. Pembiayaan pengelolaan Dana BOS seperti alat tulis kantor, insentif bendahara, dan transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS ke Bank atau PT POS.
12. Pembelian komputer (desktop/ work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing 1 unit dalam 1 tahun anggaran.
13. Bila komponen No. 1 sampai dengan 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOS, kemudian masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Disamping petunjuk penggunaan Dana BOS, Peraturan Menteri tersebut di atas juga secara tugas dan jelas tidak memperbolehkan untuk dipergunakan pada komponen-komponen berikut ini.

1. Disimpan dalam waktu lama dengan maksud untuk dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan UPTD/ SKPD kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Pusat, lebih-lebih lagi sekolah tidak ikut serta pada kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian seragam bagi guru/ siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris) sekolah.
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ ruang baru.
9. Membeli bahan/ alat yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/ wajar misal guru kontrak/ guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional atau keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ Perpajakan Program BOS yang diselenggarakan instansi/ lembaga di luar dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi/ ataupun pusat.
14. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.

2.5. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu sasaran bantuan dana BOS berkaitan dengan pembiayaan proses dan ketersediaan komponen-komponen yang menunjang kualitas pembelajaran yang meliputi: 1. peserta didik; 2. tenaga pendidik dan kependidikan; 3. sarana dan prasarana termasuk kurikulum dan metode pembelajaran; 4. manajemen sekolah.

Suatu pendidikan berkualitas dapat diindikasikan dari tiga hal yaitu input, proses, dan output. Input pendidikan meliputi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan. Proses pendidikan atau pembelajaran adalah interaksi dan interkomunikasi antar semua komponen pembelajaran. Sedangkan output pendidikan merupakan hasil dari proses pembelajaran berupa lulusan dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.

Input pendidikan dinilai berkualitas terhadap peserta didik, pendidik, kurikulum dan sarana prasarana. Peserta didik berkualitas adalah apabila memiliki tingkat multi kecerdasan dan derajat kesehatan serta semangat dan motivasi setiap individu sebagai obyek dan subyek dalam proses pembelajaran. Pendidik berkualitas sebagai subyek pembelajaran meliputi tingkat pendidikan, penguasaan Iptek, masa kerja dan pengalaman mendidik. Disamping itu semangat dan motivasi berkorban untuk kemajuan peserta didik juga sangat menentukan kualitas seorang pendidik. Selanjutnya kualitas kurikulum sebagai konten pembelajaran meliputi tingkat relevansi antara muatan kurikulum dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat sebagai pengguna output pendidikan. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan meliputi ketersediaan, kecukupan dan kelayakan semua komponen penunjang yang dapat memperlancar proses pembelajaran berkualitas. Tersedianya input yang cukup dan berkualitas menjadi prasyarat terwujudnya proses pembelajaran yang

berkualitas. Interaksi dan interkomunikasi yang dinamis antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan dukungan sarana prasarana serta metode pembelajaran yang memadai memungkinkan proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran dan penerapan metode-metode pembelajaran inovatif dapat berlangsung apabila ditunjang dengan kemampuan guru yang memadai dan dengan dukungan dana yang cukup. Untuk meningkatkan kualitas input, proses dan output pendidikan termasuk kualitas tenaga pendidik dalam memanfaatkan media dan metode pembelajaran inovatif, tenaga pendidik memerlukan berbagai pelatihan / penataran secara kontinyu dan periodik. Tuntutan kualitas ini memerlukan dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari dana BOS maupun sumber-sumber lainnya. Sehingga pengalokasian dana BOS untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menunjang keefektifan proses pembelajaran menjadi salah satu indikasi dampak dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

2.6. Kerangka Fikir

Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas antara lain dengan menerapkan wajib belajar 9 tahun yaitu untuk SD/MI sederajat selama 6 tahun dan SMP/Mts sederajat selama 3 tahun terhadap penduduk usia 7-15 tahun. Implikasi dari kebijakan ini adalah beban pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar sepenuhnya berada pada pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan memberikan bantuan biaya operasional dalam bentuk dana BOS untuk SD/MI dan SMP MTs sederajat.

Pada awalnya, kebijakan bantuan dana BOS diorientasikan untuk perluasan kesempatan belajar yaitu pada peningkatan daya tampung lembaga pendidikan dan mengurangi beban pembiayaan pendidikan masyarakat miskin. Perkembangan selanjutnya bantuan dana BOS diarahkan juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Berkurangnya beban masyarakat miskin terhadap pembiayaan pendidikan diarahkan untuk mencegah terjadinya siswa drop out atau putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi orang tua. Sejalan dengan itu bantuan dana BOS diarahkan juga untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Peranan dana BOS dalam proses pendidikan berlangsung melalui pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang cukup, pengembangan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dalam bentuk penggunaan metode-metode pembelajaran inovatif dan lainnya termasuk kemampuan guru menggunakan bantuan peralatan ICT. Disamping itu, bantuan dana BOS juga dapat diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi kendala-kendala proses pembelajaran yang bersumber dari peserta didik atau siswa seperti memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah, biaya pakaian seragam dan sepatu bagi siswa yang tidak mampu. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengalokasikan dana BOS untuk meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan reward atau hadiah berupa uang atau barang kepada mereka yang berprestasi. Sehingga dana BOS akan berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya melalui peningkatan jumlah lulusan dan nilai hasil belajar, melainkan juga pada berkurangnya siswa drop out.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Studi penelitian ini berlangsung di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten/ kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi alam geografis dan kemajuan pendidikannya dapat dipandang sama dengan kondisi kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota kabupaten ini adalah Tanjung berada pada posisi sekitar 50 Km menuju arah utara dari Kota Mataram ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai lokasi penelitian dapat dicari melalui dua jalan yaitu dari Mataram langsung terus menuju ke utara dan melalui tepi pantai Senggigi juga dari Mataram ke arah utara. Bila wilayah Kabupaten Lombok Utara dilihat membujur selatan ke utara, maka kecamatan Tanjung berada kedua dari Selatan setelah Kecamatan Pemenang yang paling selatan. Sedangkan Kecamatan Bayan adalah yang paling utara dan Kecamatan Kayangan di sebelah selatan Kecamatan Bayan. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Utara bersebelahan timur-barat dengan Kabupaten Lombok Timur sehingga juga dapat dijangkau melalui Kabupaten Lombok

Timur. Untuk mencapai lokasi penelitian tidak mengalami banyak kesulitan karena terjangkau oleh transportasi umum.

Kemajuan Kabupaten Lombok Utara dapat dipandang sama dengan kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara barat. Demikian juga halan dengan kemajuan pendidikannya. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara saat penelitian berlangsung dapat dilihat pada table ebrikut ini.

Tabel 3.1. Keadaan Lembaga Pendidikan Dasar di kabupaten Lombok Utara

No.	SEKOLAH	LEMBAGA	SISWA	GURU
1.	Sekolah Dasar (SD)	135	25.512	885
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	35	3.251	326
3.	SMP	16	6.671	193
4.	MTs	45	3.931	669
5.	Madrasah Salafiyah Ula	1	51	4
6.	Madrasah salafiyah Wustho	1	54	4
	Jumlah	233	39.470	2.081

Sumber: data dan Informasi Pendidikan tahun Pelajara 2010/ 2011.

3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara dengan fokus pada keadaan pendidikannya terutama pendidikan dasar meliputi jenjang SD/MI dan SMP/MTs sederajat sesuai Tabel 3.1. di atas. Sampel penelitian ditetapkan secara purposive dengan mempertimbangkan letak wilayah, kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, jenis layanan pendidikan (sekoah), dan angka drop out sehingga diperoleh rincian sebagaimana berikut ini.

1. Kecamatan Tanjung meliputi:

- a. Sekolah Dasar Negeri 4 (SDN 4) Sigar Penjalin : 1). Kepala Sekolah; 2). Guru Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 3).siswa drop out Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 1 dan orang tua siswa aktif Kelas 2 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
- b. Sekolah Dasar negeri 2 (SDN 2) Tegal Maja: 1). Kepala Sekolah; 2). Guru kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 3) siswa drop out Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out sekolah Kelas 5 dan orang tua siswa aktif Kelas 6 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
- c. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ishlahul Ithihad: 1). Kepala Sekolah ; 2). guru Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 3 dan orang tua siswa aktif Kelas 4 masing-masing satu orang; dan 6). Pembina yayasan sekolah satu orang.
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Tanjung, terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
- e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijaga Tanjung terdiri dari: 1). Kepala sekolah; 2). Wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). Siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4). Siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). Orang tua siswa drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
- f. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tarbiyatul Kopang Tanjung terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9

- masing-masing satu orang; 4). Siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
2. Kecamatan Kayangan meliputi:
- a. Sekolah Dasar Neger 1 (SDN 1) Kayangan: 1). Kepala Sekolah; 2). guru Kelas 1 dan kelas 2 masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 1 dan orang tua siswa aktif Kelas 2 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
 - b. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN1) Santong terdiri dari : 1). Kepala Sekolah; 2). guru Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 3) siswa drop out Kelas 5 dan kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 5 dan orang tua siswa aktif Kelas 6 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
 - c. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Marakitta'limat: 1). Kepala Sekolah ; 2). Guru Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang; 3).siswa drop out Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 3 dan orang tua siswa aktif Kelas 4 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Kayangan, terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Bagiyatussolihin terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). Orang tua siswa drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
3. Kecamatan Bayan meliputi:
- a. Sekolah Dasar Neger 1 (SDN 1) Bayan terdiri dari : 1). Kepala Sekolah; 2). guru Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 3). siswa drop out sekolah Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 1 dan orang tua siswa aktif Kelas 2 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
 - b. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN2) Anyar terdiri dari :1). Kepala Sekolah; 2). guru Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 3) siswa drop out Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 5 dan orang tua siswa aktif Kelas 6 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
 - c. Madrasah Salafiyah Ula Sambik Elen : 1). Kepala Sekolah ; 2). tutor satu orang; 3). siswa drop out dua orang; 4).siswa aktif dua orang; 5). orang tua siswa drop out dan orang tua siswa aktif masing-masing satu orang; 6). pengurus yayasan satu orang.
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Bayan terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali Kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 7, dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang .
 - e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Bayan terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out dua orang; 4). siswa aktif dua

- orang; 5). orang tua siswa drop out sekolah dan orang tua siswa aktif masing-masing satu orang;
6). pengurus yayasan pembina satu orang.
4. Pejabat Struktural dan Fungsional kabupaten.

Untuk melengkapi kebutuhan melengkapi informasi maka beberapa pejabat struktural maupun fungsional kabupaten dan kecamatan juga ikut menjadi sumber data informasi. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten Lombok Utara, Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Lombok Utara, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan, dan pengawas pendidikan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara terpimpin (Guide Interview) sebagai metode pokok dan metode dokumentasi sebagai metode pelengkap.

1. Metode Wawancara.

Metode wawancara terpimpin digunakan untuk mengumpulkan data-data primer langsung dari subyek penelitian yang ditetapkan sebagai informan. Sebagai pedoman dalam wawancara disiapkan 9 jenis format yang terdiri dari : a). format 01 untuk kepala sekolah meliputi 25 pertanyaan; b). format 02 untuk guru-guru meliputi 22 pertanyaan; c). format 03 untuk pengurus komite sekolah/ pengurus yayasan Pembina meliputi 20 pertanyaan; d). format 04 untuk pengawas sekolah meliputi 9 butir pertanyaan; e). format 05 untuk siswa yang masih aktif meliputi 20 pertanyaan; f). format 06 untuk siswa drop out; g). format 07 untuk orang tua siswa aktif meliputi 15 pertanyaan; h). format 08 untuk orang tua siswa drop out meliputi 15 pertanyaan; dan i). format 09 untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ ka. Kandepag Kabupaten/ Ka UPTD pendidikan Kecamatan.

Pelaksanaan wawancara oleh 6 (enam) orang enumerator yang sudah terlatih dan berpengalaman serta berpendidikan minimal S1. Enumerator dibagi menjadi 2 (dua) orang di masing-masing lokasi kecamatan. Sebelum pelaksanaan wawancara para enumerator diberikan pelatihan dan petunjuk tentang format-format pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara berlangsung serempak pada tiga kecamatan yaitu Tanjung, Kayangan, dan Bayan tanggal 23 – 28 September 2013 selama 6 hari efektif.

2. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diasumsikan dapat menunjang dan memperkuat data primer. Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai hal antara lain: keadaan sekolah termasuk perkembangannya, keadaan siswa, keadaan guru, RAPBS sekolah, pengelolaan dana BOS, laporan realisasi anggaran sekolah, dan dokumen penunjang lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dengan mengunjungi kantor instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok-Utara, Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung, UPTD Pendidikan Kecamatan Kayangan, UPTD Pendidikan Kecamatan Bayan, dan beberapa instansi terkait lainnya.

3.4. Metode Analisa Data

Data hasil wawancara yang dihimpun enumerator, selanjutnya diedit dan direkap oleh peneliti dalam format data kuantitatif. Pada proses editing dan tabulasi data peneliti dibantu oleh enumerator sekaligus memberikan konfirmasi terhadap data/informasi yang sudah dikumpulkan. Pada tahap pertama, tabulasi dilakukan pada masing-masing kecamatan dan pada tahap kedua tabulasi data kecamatan dihimpun dalam tabulasi kabupaten.

Berdasarkan data yang ditabulasi. Dilakukan analisa dengan metode statistik deskriptif dan metode kualitatif (induksi-deduksi). Metode statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui modus persebaran data kuantitatif sebagai dasar merumuskan kesimpulan. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan kaidah logika formal (induksi-deduksi) terhadap kecenderungan (volume) jawaban informan pada setiap butir pertanyaan dan menjadi indikator-indikator setiap sub dari permasalahan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian berikut merupakan penampilan dan analisa data baik dari data primer maupun sekunder yang mengantar kepada simpulan.

4.1. Kondisi Geografis Dan Administratif Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara (KLU) terletak di bagian utara Pulau Lombok, berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat di sebelah selatannya, dengan Kabupaten Lombok Timur sebelah timurnya, dengan Selat Lombok sebelah baratnya, dan Laut Jawa di sebelah utaranya. Luas wilayahnya ,emcapai 806,75 Km2 yang secara geografis terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil (gili). Wilayah daratannya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta pantai.Sedangkan kepulauannya meliputi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Terawangan.

Secara administrative Kabupaten Lombok Utara (KLU) adalah kabupayen baru hasil pecahan dari Kabupaten Lombok-Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008., mwliputi 5 kecamatan yang membawahi 33 desa dimana 21 diantaranya masih termasuk desa tertinggal (Data Dan Informasi Pendidikan NTB 2010/2011). Jumlah penduduknya 200.072 jiwa dengan penduduk miskin mencapai 39,27% (NTB Dalam Angka 2011), sehingga kepadatan penduduknya mencapai 276 jiwa per Km2. Penyebaran penduduk per kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1. Pembagian Wilyah Kependudukan Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah penduduk	Kepadatan
		Laki	Perempuan		
1.	Tanjung	21.962	22.644	44.606	386
2.	Pemenang	16.462	16.084	32.546	251
3.	Gangga	19.996	20.870	40.836	260
4.	Kayangan	18.334	19.079	37.413	331
5.	Bayan	21.943	22.728	44.671	153
	Total	98.957	101.405	200.072	276

Sumber: Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 201.

Keadaan penduduk di atas bila dilihat dari kelompok usiayang dapat menunjukkan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.2.Keadaan Penduduk Kabupaten Lombok Utara menurut Kelompok Usia.

Umur	Kecamatan					Jumlah Penduduk
	Tanjung	Pemenang	Gangga	Kayangan	Bayan	
0-4	4.123	2.998	4.070	4.546	5.233	21.060
5-9	4.069	3.305	4.233	4.167	5.301	21.075
10-14	4.390	3.335	4.154	3.846	4.889	20.614
14-19	3.991	3.317	3.585	3.349	3.939	18.181
20-24	3.667	3.432	3.591	3.112	3.716	17.518
25-29	4.294	3.353	3.960	3.384	4.112	19.103
30- 34	3.723	2.633	3.532	2.856	3.302	16.046
Dst						
Jumlah	44.606	32.546	40.836	37.413	44.671	200.072

Sumber: Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2011.

4.2. Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya

Penduduk Kabupaten Lombok Utara mayoritas Suku Sasak, umumnya menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor pertanian, perkebunan dengan hasil utama berupa beras, kopi, dan kelapa. Sebagian lainnya dari sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa pariwisata.

4.3. Profil Pendidikan.

Hasil pembangunan pendidikan saat ini meunjukkan penngkatan sarana prasarana yang sangat berarti.Perkembangan lenbaga pendidkan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.3.Keadaan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Lombok Utara

No.	Jenjang Dan Jenis Lemb. Pendidikan Negeri/ Swasta	Jumlah Lembaga Tahun Pelajaran		
		10/11	11/12	12/13
1.	Sekolah Dasar	130	146	147
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	15	38	39
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9	9	9
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	7	7	7
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	35	35	35
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	45	45	45
7.	Madrasah Aliyah (MA)	20	20	20
8.	Madrasah Salafiyah	1	1	1
	Jumlah	262	301	303

Sumber: Data Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2012).

Data tabel di atas menunjukkan perkembangan lembaga pendidikan yang tadinya pada Tahun 2010.2011 berjumlah 262 menjadi 303 pada Tahun 2012/2013. Peningkatan ini terutama terdapat pada lembaga pendidikan dasar SD dan SMP sederajat yang mengindikasikan keberhasilan cukup berarti pada kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

1. Profil Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah.

a. Profil Siswa.

Sekolah Dasar di kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2012 berjumlah 146 buah dengan rombongan belajar sebanyak 872 kelas. Kemudian pada Tahun 2013 terdapat peningkatan menjadi 147 buah dengan rombongan belajar menjadi 875 kelas. Peningkatan yang tidak besar pada sekolah dan rombongan belajar diikuti peningkatan jumlah siswa yang lebih besar yaitu 24.953 orang pada Tahun 2012 menjadi 25.048 pada Tahun 2013, hampir 100 orang siswa. Gambaran rinci tentang peningkatan siswa dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.4.jumlah sekolah, Kelas, Dan Siswa SD Tahun 2012 dan Tahun 2013.

Tahun 2012 Jumlah Sekolah Dasar 146			Tahun 2013 Jumlah Sekolah Dasar 147		
Kelas	Rombongan Belajar	Jumlah Siswa	Kelas	Rombongan Belajar	Jumlah Siswa
I	146	4.413	I	147	4.676
II	146	4.229	II	147	4.266
III	146	4.328	III	146	4.129
IV	146	4.106	IV	146	4.103
V	144	4.010	V	145	4.019
VI	144	3.867	VI	144	3.855
Total	872	24.953	Total	872	25.048

Sumber: Data Primer Diolah.

Secara keseluruhan table di atas menjelaskan peningkatan jumlah peningkatan siswa yang dapat dinilai sangat berarti. Lebih-lebih bila diperhatikan peningkatan jumlah siswa pada Tahun 2012 dan 2013 terdapat pada kelompok belajar kelas I dan Kelas II. Sehingga hal ini dapat diartikan memperkuat secara berarti keberhasilan kebijakan wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

b. Profil Guru.

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki peranyang sangat strategis dalam pendidikan dan pembelajaran. Guru sebagai pendidik merupakan sumber utama ilmu, pengetahuan, ketrampilan, dan nilai bagi siswanya. Guru adalah teladan dan panutan yang baik dan ideal untuk dapat digugu dan ditiru oleh siswa. Sehingga kompetensi guru menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Profil guru Sekolah Dasar pada Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun golongannya. Dari sisi tingkat pendidikan dapat diketahui kompetensi berdasarkan ijazah yang dimiliki guru, sedangkan dari pangkat dan golongan dapat menunjukkan pengalaman kerja guru-guru tersebut. Pengalaman kerja yang tinggi menunjukkan bahwa guru-guru yang ada cukup layak dan dapat dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi memadai untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagai guru. Pengalaman kerja yang tinggi akan memberikan kemampuan pemahaman permasalahan pendidikan yang tinggi pada guru dan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi pada siswanya. Untuk mengetahui kondisi guru di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pemahaman terhadap tingkat kemampuan guru dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Tabel 4.5. Profil Guru SD Berdasarkan Tk. Pendidikan, Golongan Dan Sertifikasi.

No,	Guru Menurut Pendidikan		Guru Menurut Golongan		Guru Menurut Sertifikasi	
	1.	SMTA/ SPG	206	II/a	6	Sertifikasi
2.	Diploma	267	II/b	61	Belum	333
3.	S1(Strata Satu)	232	II/c	56		
4.	S2 (Strata Dua)	1	II/d	36		
5.			III/a	40		
6.			III/b	28		
7.			III/c	33		
8.			III/d	66		
9.			IV/a	379		
10.			IV/b	1		
	Jumlah	706		706		706

Sumber: Data Primer Diolah.

Tabel di atas menjelaskan banyak guru-Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Utara cukup layak karena sebagian besar gurunya memiliki pendidikan tamatan di atas SLTA yaitu Diploma, Strata Satu bahkan ada yang Strata dua. Kelayakan kemudian ditunjang oleh dominasi menonjol sebagian besar guru golongan III ke atas dan dari jumlah tersebut ternyata lebih banyak yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sisanya yang belum sedang dalam proses sertifikasi.

2. Profil Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah.

a. Profil Siswa.

Gambaran yang jelas tentang perkembangan siswa SMP/ Madrasah Tsanawiyah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6. Jumlah sekolah, Kelas, Dan Siswa SD Tahun 2012 dan Tahun 2013

Keadaan SMP/ MTs Tahun 2012			Keadaan SMP/ MTs Tahun 2013		
Kelas	Romb. Belajar	Jml. Siswa	Kelas	Romb. Belajar	Jml. Siswa
VII	38	2.571	VII	36	2.469
VIII	36	2.390	VIII	36	2.540
IX	33	2.170	IX	36	2.253
Total	107	7.131	Total	108	7.262

Sumber: Data Primer Diolah.

Secara keseluruhan jumlah siswa SMP / MTs dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Kenaikan jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penyerapan siswa usia sekolah yang mengikuti pendidikan.

b. Profil Guru.

Keadaan guru SMP / MTS di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.7 Profil Guru SD Berdasarkan Tk. Pendidikan, Golongan Dan Sertifikasi

No.	Guru Menurut Pendidikan	Guru Menurut Golongan	Guru Menurut Sertifikasi			
1.	SMTA	1	II/b	3	Sertifikasi	64
2.	Diploma	8	II/c	-	Belum	119
3.	S1(Strata Satu)	173	II/d	1		
4.	S2 (Strata Dua)	1	III/a	29		
5.			III/b	28		
6.			III/c	25		
7.			III/d	17		
8.			IV/a	79		
	Jumlah	183		183		183

Sumber: Data Primer Diolah.

Profil guru SMP/MTS dapat dipandang layak karena dari 183 orang guru hanya 1 orang yang berpendidikan SMTA dan ini merupakan guru lama berada pada sekolah swasta. Selebihnya adalah pendidikan tinggi hanya 8 orang yang Diploma, 173 orang S1 bahkan ada satu orang S2. Untuk golongan juga didominasi oleh Golongan III dan IV, demikian juga halnya dengan sertifikasi, yang telah menyelesaikan sekitar 30an % dan sisanya dalam proses yang akan segera tuntas.

4.4. Sistem Pembiayaan Pendidikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk bantuan pemerintah pusat yang disalurkan ke sekolah-sekolah/ madrasah-madrasah atau lembaga pendidikan lainnya melalui pemerintah provinsi yang diikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan penggunaannya. Pelaksanaan bantuan Dana BOS telah berlangsung sejak Tahun 2005 yang diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat orang tua murid terutama yang kurang mampu di Seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Utara. Disamping pembiayaan, melalui BOS juga diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menurunkan jumlah siswa putus sekolah.

1. Penerimaan Bantuan dana BOS Pada SD Dan Sederajat.

Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat yang telah menerima bantuan Dana BOS pada Tahun 2012 sebanyak 130 sekolah/ lembaga yang mencapai 25.051 siswa dengan jumlah dana mencapai Rp14.529.580.000,- (Empat belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Pada Tahun 2013 jumlah lembaga yang menerima meningkat menjadi 147 sekolah tetapi jumlah siswa menurun menjadi 25.035 sehingga jumlah danapun menurun yang mencapai Rp14.520.300.000 (Empat belas milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Jumlah ini menunjukkan setiap siswa menerima bantuan satu tahun sebesar Rp580.000 atau sekitar Rp50.000 untuk setiap bulan. Persebaran penerimaan bantuan setiap kecamatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.8. Jumlah SD, Siswa, Dana BOS Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah BOS (000)	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah BOS (000)
1	Pemenang	22	4.159	2.412.220	24	4.101	2.378.580
2	Tanjung	32	5.187	3.008.460	34	5.530	3.207.400
3	Gangga	27	4.779	2.771.820	28	4.911	2.848.380
4	Kayangan	23	4.889	2.835.620	25	4.679	2.713.820
5	Bayan	26	6.037	3.501.460	36	5.814	3.372.120
		130	25.051	14.529.580	147	25.035	14.520.300

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel di atas menunjukkan meskipun terdapat data jumlah siswa dan dana BOS menurun tetapi terdapat kenaikan signifikan pada jumlah lembaga.

2. Penerimaan Bantuan dana BOS Pada SMP Dan Sederajat.

Persebaran bantuan dana BOS pada SMP sederajat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Jumlah SMP, Siswa dan Dana BOS Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah BOS (000)	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah BOS (000)
1	Pemenang	3	541	384.110	3	520	369.200
2	Tanjung	6	1.823	1.294.330	6	1.861	1.321.310
3	Gangga	7	1.502	1.066.420	7	1.494	1.060.740
4	Kayangan	9	1.664	826.440	11	1.302	924.470
5	Bayan	9	1.825	1.295.750	11	1.943	1.379.530
		34	6.855	4.867.050	38	7.120	5.055.200

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari Tahun 2012 ke 2013 jumlah lembaga, siswa dan dana pada SMP meningkat. Yang menarik pada Tabel 4.9 ini peningkatan terkonsentrasi pada Kecamatan Kayangan dan Bayan. Mungkin peningkatan pada kecamatan lainnya akan menyusul pada tahun-tahun berikutnya.

3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Penyaluran dana BOS dilakukan dari provinsi yaitu oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung kerekening sekolahsetiap triwulan setelah menerima laporan berkaitan terutama penerimaan siswa baru secara berjenjang mulai dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Baratdimana penyaluran dana BOS sebelumnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga langsung ke rekening sekolah. Perubahan penyaluran Oleh Biro Keuangan Setda Provinsi adalah sesuai Juklak Juknis terkaitterakhir meskipun terkesan memperpanjang alur birokrasi.

Penerimaan bantuan dana BOS di sekolah masih ditemui adanya keterlambatan sebagaimana data pada table berikut ini.

Tabel 4.10. Klasifikasi Penerimaan Dana BOS Di Sekolah

No.	Klasifikasi Penerimaan	Jumlah %
1.	Selalu Terlambat	11,76
2.	Kadang Terlambat	58,52
3.	Tidak Pernah Terlambat	29

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sekitar 29% yang tidak pernah mengalami keterlambatan, selebihnya sebagian besar kadang terlambat yang mencapai separuh lebih sasaran penerima dan sejumlah kecil yang yang selalu terlambat.Hasil studi menjelaskan keterlambatan bukan disebabkan oleh masalah prinsip tetapi umumnya masalah-masalah teknis yang dapat diartikan bahwa upaya untuk mencapai tepat waktu kurang diusahakan secara sungguh-sungguh.

Pemanfaatan bantuan Dana BOS harus dilakukan melalui proses perencanaan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah yang disingkat RAPBS. Semua kegiatan yang harus didukung penganggaran harus tercantum pada RAPBS.Namunternyata tidak semua satuan lembaga pendidikan penerima bantuan dana BOS menerapkan sistim RAPBS. Hasil study menunjukkan tidak selalu sesuai sistim RAPBS.

Tabel 4.11. Klasifikasi Penerimaan Dana BOS Di Sekolah

No.	Klasifikasoi Penyusunan RAPBS	Jumlah %
1.	Tidak Pernah Menyusun RAPBS	5,88
2.	Kadang Menyusun RAPBS	5,88
3.	Selalu Menyusun RAPBS	88,23

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel di atas menjelaskan hanya sekitar 88,23% lembaga penyelenggara pendidikan dasar penerima bantuan dana BOS yang secara tertib selalu menyusun RAPBS dalam mendukung berbagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Selebihnya ada yang tidak pernah menyusun RAPBS dan ada juga yang hanya kadang-kadang saja.

Dalam penyusunan RAPBS ternyata proses penyusunannya tidak dilakukan secara tertib sesuai menurut Juklak Juknis. Semestinya penyusunanRAPBS harus dengan melibatkan fihak-fihak terkait tertentu.Tetapi ternyata studi menunjukkan tidak demikian, karena ada fihak yang hanya kadang-kadang dilibatkan seperti pada table berikut ini.

Tabel 4.12. Keterlibatan Komponen Sekolah Dalam Penyusunan RAPBS.

No.	Klasifikasoi Keterlibatan Penyusunan RAPBS	Jumlah %
1.	Tidak Ada Yang Terlibat	-
2.	Kadang Terlibat	5,88
3.	Selalu terlibat	94,11

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum lengkap semua satuan lembaga pendidikan dasar penerima bantuan dana BOS yang selalu melibatkan fihak-fihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan RAPBS.

Penggunaan bantuan dana BOS pada dasarnya diperuntukkan untuk 2sasaranpokok yaitu yanguntuk peningkatan kualitas danuntuk sarana penunjang pendidikan. Kedua sasaran pokok tersebut kemudian menurut juklak/ juknis dirinci menjadi 20 kegiatan dengan empat macam kualifikasi tahap pelaksanaan yaitu: a. tidak pernah dilaksanakan: b. sedang dilaksanakan; c. dilaksanakan sebagian; dan d. selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.13. Alokasi Bantuan Dana BOS

No.	Sasaran Penggunaan	Klasifikasi penggunaan (%)			
		a	b	c	d
1.	Perawatan Gedung	5,9	23,5	52,9	17,6
2.	Pengadaan Buku Pelajaran	0,0	0,0	29,4	70,6
3.	Pengadaan Media Pembelajaran	0,0	5,9	70,6	23,5
4.	Pelatihan Penataran Guru	17,6	17,6	47,1	17,6
5.	Seminar Guru	17,6	17,6	47,1	17,6
6.	Penelitian / Karya Tulis Guru	47,1	35,3	17,6	23,5
7.	Pembinaan Bakat Siswa	0,0	17,6	52,9	29,4
8.	Bimbingan/ Remedial Siswa	0,0	11,8	29,4	58,8
9.	Bantuan Transport siswa Miskin	52,9	5,9	11,8	29,4
10.	Bantuan Pakaian Siswa Miskin	52,9	5,9	11,8	29,4
11.	Pembinaan lmtaq	35,3	0,0	29,4	35,3
12.	Pembinaan Pramuka Dan PMR	0,0	5,9	23,5	70,6
13.	Pembinaan Siswa Putus Sekolah	5,9	11,8	35,3	47,1
14.	Pengadaan ATK	23,5	11,8	29,4	35,3
15.	Pengadaan Perangkat ICT	11,8	5,9	35,3	47,1
16.	Pengadaan Daya listrik DLL.	5,9	5,9	17,6	70,6
17.	Penerimaan Siswa baru	5,9	0,0	11,8	82,4
18.	Ulangan	0,0	0,0	0,0	100
19.	Honor Guru Dan Pegawai Lepas.	5,9	11,8	0,0	82,4
20.	Lainnya	0,0	0,0	5,9	11,8

Sumber : Data Primer Diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana untuk semua kegiatan tidak berpola pada dukungan kegiatan tertentu. Semua sasaran kegiatan menjadi perhatian yang samauntuk dilaksanakan sehingga penggunaan dana sepenuhnya menjadi kewenangqan kepala sekolah untuk mengarahkankepada prioritas kebijakan. Untuk itu perlu arahan pada juklak atau juknis untuk meningkatkan penajaman penggunaan dana dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar9 tahun dan meningkatkan kulitas pendidikan.

Pemahan guru dan fungsionallain sebagai pelaku dan peminapendidikan termasuk keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana BOS dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.14. Pemahaman Guru , Pengawas, Yayasan, Terhadap Dana BOS

Komponen	Pengetahuan Tentang Dana BOS			Keterlibatan Alokasi Dana BOS		
	Banyak	Sedikit	Tidak ada	Banyak	Sedikit	Tidak ada
Guru	100%	0%	0%	88%	12%	0%
Pengawas	100%	0%	0%	100%	100%	0%
Yayasan	100%	0%	0%	100%	100%	0%

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel diatas menunjukkan pengelolaan bantuan dana BOS cukup transparan karena fihak terkait yaitu guru, pengawas, yayasan mengetahui dan terlibat seuai keperluan dalam pengelolaannya. Hanya sekitar 12% saja guru dari lembaga pendidikan sasaran penerima bantuan yang merasa kurang dilibatkan.

4.5. Pengaruh Dana BOS Terhadap Beban Biaya Pendidikan Oleh Masyarakat

Kebijakan pemerintah ingin mengurangi beban masyarakat terutama untuk pembiayaan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP sederajat. Studi di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah dapat dinikmati oleh masyarakat secara bervariasi. Ada satuan lembaga pendidikan dasar yang merasa tercukupi kebutuhan pembiayaan pendidikanya namun ada yang merasa masih memerlukan tambahan biaya lagi karena ternyata standar kualitas pendidikan pada satuan pendidikan dasar penerima bantuan dana BOS terdapat perbedaan. Sehingga beberapa lembaga satuan pendidikan dasar masih tetap memerlukan tambahan biaya pendidikan dari masyarakat.

Secara umum jenis biaya pendidikan menurut sumbernya pada satuan lembaga pendidikan dasar bervariasi yaitu: 1. Bantuan block grant dari Kemedikbud pusat; 2. bantuan pemerintah provinsi; 3. biaya pendidikan dari pemerintah Kabupaten; 4. bantuan dana BOS; 5. bantuan masyarakat orang tua murid; 6. bantuan para dermawan; 7. dari sumber lainnya.

Hasil studi lapangan menunjukkan sesuai tabel berikut ini.

Tabel 4.15. Keterlibatan Komponen Sekolah Dalam Penyusunan RAPBS

No.	Klasifikasi Keterlibatan Penyusunan RAPBS	Jumlah %
1.	Block Grant Bantuan Pusat.	29,4
2.	Bantuan Pemerintah Provinsi	52,9
3.	Pembiayaan pemerintah Kabupaten	58,8
4.	Bantuan Dana BOS	100
5.	Orang Tua Murid	35,3
6.	Dermawan	23,5
7.	Sumber Lainnya	23,5

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya bantuan dan BOS yang menjangkau seluruh lembaga pendidikan dasar. Selebihnya bervariasi. Ada sekolah yang memiliki sumber biaya semuanya, ada yang sebagian saja yang ada dengan kondisi yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara nampaknya hanya membantu membiayai sekolah negeri saja. Sumber-sumber pembiayaan tradisional lembaga pendidikan dasar yaitu orang tua murid masih tetap berlangsung meskipun tidak pada semua satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengurangan beban masyarakat orang tua murid terhadap beban biaya pendidikan tetapi pengurangan beban tersebut tidak mampu mengatasi seluruh pembiayaan pendidikan. Sehingga biaya satuan persiswa, per guru, persekolah pada setiap satuan lembaga pendidikan dasar berbeda-beda.

Gambaran di atas diperkuat juga oleh hasil studi yang lebih tajam sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.16. Peranan Orang Tua Dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar.

No.	Lembaga Pendidikan	Pungutan Biaya Orang Tua		Keterangan	
		Pungut	Tidak Pungut	N	S
1.	Sekolah dasar	-	Tidak Pungut	V	
2.	SMP	-	Tidak Pungut	V	
3.	Madrasah Ibtidaiyah	V	-		V
4.	Madrasah Tsanawiyah	V	-		V
5.	Madrasah Salafiah	v	-		V

Sumber: Hasil Wawancara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dasar oleh masyarakat orang tua dilakukan hanya pada lembaga pendidikan swasta. Sedangkan yang negeri tadinya adalah juga berbentuk sama dengan lembaga pendidikan swasta tetapi setelah ada bantuan dan BOS berubah tidak dalam bentuk pungutan lagi tetapi umumnya dalam bentuk sumbangan. Perhatikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Lombok Utara adalah sama, dapat dinilai kemampuan masyarakat orang tua murid pada sekolah negeri dan swasta juga sama, sehingga masyarakat orang tua murid lembaga pendidikan dasar negeri adalah potensi untuk sewaktu waktu akan dapat menjadi sumber pungutan yang efektif. Jadi kehadiran bantuan dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan dasar untuk negeri di Kabupaten Lombok Utara dapat dinilai sangat membantu masyarakat orang tua murid karena dapat merubah sumber pembiayaan masyarakat orang tua murid dari efektif menjadi patensi dengan kata lain saat ini tidak dipungut lagi.

4.6. Dampak Pembiayaan Dana BOS Terhadap Kualitas Pendidikan

Studi dampak bantuan dana BOS di Kabupaten Lombok Utara difokuskan pada kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan penanggulangan siswa putus sekolah.

1. Dampak Dana BOS Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran.

Dampak dana BOS terhadap kualitas pembelajaran dapat diidentifikasi dari alokasi dana BOS dalam rangka: a. menyediakan sarana dan alat bantu pembelajaran; b. meningkatkan kemampuan guru; c. meningkatkan kualitas belajar siswa; d. kualitas metode dan strategi pembelajaran.

a. Alokasi Dana BOS Untuk Sarana Dan Alat Bantu Pelajaran.

Untuk memahami perhatian terhadap alat bantu diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 1. belum pernah dilaksanakan; 2. direncanakan untuk dilaksanakan; 3. dilaksanakan sebagian; 4. Telah dilaksanakan sepenuhnya. Dari klasifikasi ini dapat dilihat keadaan di Kabupaten Lombok Utara seperti pada table berikut ini.

Tabel 4.17. Pengalokasian Dana BOS Untuk Sarana, Prasarana, Dan Alat Bantu.

No.	Kegiatan dibiayai Dana BOS	Pilihan Jawaban (%)			
		1	2	3	4
1.	Perawatan Gedung	9,3	20,4	40,7	29,6
2.	Pengadaan Buku Pelajaran dan Perpustakaan	0,0	11,1	27,8	59,3
3.	Pengad. media pembelajaran dan alat peraga	0,0	13,0	46,3	35,2
4.	Pengadaan bahan habis pakai seperti ATK DLL.	1,9	0,0	0,0	61,1
5.	Pengadaan Perangkat ICT, Komputer, Laptop.	5,6	14,8	25,9	48,1
6.	Pembayaran Daya Seperti Listrik DLL.	5,6	5,6	22,2	61,1

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bantuandana BOS untuk berbagai jenis sarana dan prasarana telah dilakukan oleh hampir semua satuan pendidikan dasar. Pada saat study berlangsung, hanya beberapa lembaga yang belum melaksanakan untuk kegiatan pengadaan buku dan peralatan, dan hanya sedikit lembaga yang dalam tahap perencanaan dan sebagian besar sedang atau telah selesai melaksanakan Perbedaan tahap ini sesungguhnya disebabkan oleh tuntutan kondisi sarana prasarana lembaga satuan pendidikan dasar yang ternyata ada yang masih baik atau harus diperbaiki.

b. Alokasi Dana BOS Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru.

Usaha peningkatkan kemampuan guru dilakukan melakukan melalui kegiatan pelatihan/ penataran, dskusi atau seminar inovasi pembelajaran, dan penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Untuk memahami alokasi bantuan dana BOS dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dilakukan 4 klasifikasi yaitu: 1. Belum pernah dilaksanakan; 2. Direncanakan untuk dilaksanakan; 3. Dilaksanakan sebagian; dan 4. Dilaksanakan sepenuhnya. Hasil studi menunjukkan seperti table berikut ini.

Tabel 4.18: Alokasi Dana BOS untuk Peningkatan Kemampuan Guru

No.	Kegiatan dibiayai Dana BOS	Pilihan Jawaban (%)			
		1	2	3	4
1.	Pelatihan/Penataran Profesionalitas Guru	9,8	25,5	43,1	21,6
2.	Diskusi/seminar inovasi pembelajaran	19,6	29,4	39,2	9,8
3.	Peneliti Atau Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	37,3	37,3	19,6	5,9

Sumber: Data Primer Diolah.

Tabel di atas menjelaskan bahwa kegiatan peningkatan kemampuan guru yang banyak dilaksanakan adalah pelatihan dan penataran, sedangkan penelitian maupun penyusunan karya tulis sebagian besar belum dilaksanakan. Hal ini mengindikasin bahwa perhatian dukungan dana terhadap usaha peningkatan kemampuan guru masih belum optimal.

c. Alokasi Dana BOS Untuk Meningkatkan Kualitas Siswa.

Siswa atau peserta didik merupakan obyek sekaligus subyek pada proses pembelajaran dalam rangka pendidikan. Meningkatkan kemampuan siswa berarti meningkatkan kemampuan siswa untuk berperan sebagai subyek dan obyekdalam kegiatan pendidikan. Untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut dilakukan melalui: pembinaan minat seperti bakat dan kegemaran, kemudian bimbingan atau remedial bagi siswa yang bermasalah dalam belajar, selanjutnya pembinaan mental iman dan taqwa, dan yang terakhir PMR dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan-kegiatan di atas kemudian dilihat dari 4 klasifikasi yang sama dengan kegiatan sebelumnya. Keadaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19 : Alokasi Dana BOS untuk Peningkatan Kualitas Siswa.

No.	Kegiatan dibiayai Dana BOS	Pilihan Jawaban (%)			
		1	2	3	4
1.	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kegemaran	2,0	9,8	52,9	15,3
2.	Remedial/ Bimbingan Bagi Siswa Bermasalah	0,0	5,9	29,4	64,7
3.	Pembinaan Iman Dan Taqwa (Imtaq)	3,9	7,8	19,0	74,5
4.	Pembinaan PMR, Pramuka, Dll.	3,9	7,8	27,5	60,8

Sumber: Data Primer Diolah.

Table di atas menunjukkan bahwa alokasi dana dalam rangka peningkatan kualitas siswa telah dilakukan untuk semua jenis kegiatan. Ada sebagian kecil lembaga pendidikan dasar yang belum merencanakan sama sekali, sebagian kecilnya lagi hanya mencapai tahap penyusunan rencana dan sebagian besar sisanya yang mencapai sekitar 88% sedang arau telah selesai melaksanakan.

d. Alokasi Bantuan Dana BOS Untuk Kualitas Metode dan Strategi Pembelajaran.

Untuk memahami usaha peningkatan kualitas dan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan dukungan alokasi bantuan dana BOS, studi ini memperhatikan dari sisi mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, alat peraga/ media dan lain-lain, menerapkan metode bervariasi sesuai materi, menggunakan metode pembelajaran inovatif seperti PAKEM, PHL, CL, Portofolio dan lain-lain, menggunakan bahan-bahan ajar seperti buku dan LKS, memanfaatkan media pembelajaran, dan selalu memeriksa sekaligus memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan tugas-tugas siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana upaya sebelumnya dilihat dari klasifikasi tidak pernah dilaksanakan, direncanakan, sedang dilaksanakan dan telah selesai dilaksanakan. Hasil studi dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.20: Alokasi Dana BOS Untuk Kualitas Metode dan Strategi Pembelajaran

No.	Kegiatan dibiayai Dana BOS	Pilihan Jawaban (%)			
		1	2	3	4
1.	Selalu Menyiapkan perangkat Pembelajaran	0	35,3	11,8	52,9
2.	Menggunakan metode bervariasi	0	11,8	52,9	29,4
3.	Menerapkan Metode Pembelajaran Inovatif	0	23,5	35,3	41,2
4.	Menggunakan Bahan Ajar	0	17,6	41,2	58,8
5.	Memanfaatkan Media Pembelajaran	0	17,6	58,8	23,5
6.	Memeriksa Dan Memberikan Umpan Balik	0	17,6	35,3	58,8

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi bantuan dana BOS untuk meningkatkan kualitas metode dan strategi pembelajaran untuk seluruh kegiatan telah dilaksanakan. Tidak seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Tetapi untuk peningkatan kualitas metode dan strategi pembelajaran dilaksanakan oleh semua satuan penyelenggara pendidikan dasar. Dalam pelaksanaannya sebagian kecil masih dalam perencanaan selebihnya yang merupakan bagian yang besar sedang melaksanakan atau telah selesai melaksanakan.

4.7. Dampak Bantuan Dana BOS Terhadap Kualitas Hasil Belajar.

Kualitas hasil belajar sering ditunjukkan oleh hasil belajar siswa baik pada ujian nasional maupun ujian sekolah. Hasil belajar ditentukan oleh dua faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal bersumber dari siswa sendiri berupa tingkat kecerdasan, motivasi, minat/ bakat, fasilitas individu, dan kelompok siswa. Pengembangan potensi Faktor Internal tersebut menjadi pendukung yang sangat berarti hasil belajar siswa. Sedangkan Faktor Eksternal merupakan hal-hal diluar siswa sendiri. Oleh karena itu pengalokasian dana BOS dalam rangka mendukung pengembangan potensi internal siswa menjadi indikator dampak dana BOS terhadap kualitas hasil belajar yang kemudian dapat dilihat pada tingkat kelulusan dan nilai rata-rata hasil ujian siswa.

a. Dampak Dana BOS Terhadap Tingkat Kelulusan.

Tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.21. Perkembangan Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Sederajat 3 tahun

Tahun Pelajaran	Peserta Ujian	Jumlah Lulusan	% Kelulusan
2010/2011	856	855	99,8
2011/2012	876	876	100
2012/2013	821	812	100

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada pengamatan data selama 3 tahun ada kenaikan kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs meskipun tidak besar karena dalam proses tase yang kecil tetapi mampu

mencapai angka maksimal 100%. Pada tahun berikut prestasi maksimal mampu dipertahankan yang mengindikasikan bahwa bantuan dana BOS memiliki dampak terhadap tingkat kelulusan.

b. Dampak Dana BOS Terhadap Tingkat Peningkatan Hasil Ujian.

Dampak bantuan dana BOS terhadap kualitas belajar siswa dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 4.22: Nilai Rata-Rata Hasil UASBN/ UN Pada SD/MI dan SMP/MTs

Tahun Pelajaran	Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran				Jumlah	Rata Rata
	Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	Bahasa Inggris		
2010/2011	6,9	7,0	6,4	7,4	27,7	6,9
2011/2012	6,4	6,4	6,0	7,3	27,0	6,7
2012/2013	6,7	6,5	6,2	7,1	25,5	6,4

Sumber: Data Primer Diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil USBN/UN dalam 3 tahun semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan dana BOS pada SD/MI dan SMP/MTs sederajat belum memiliki dampak terhadap peningkatan hasil belajar UASBN/UN. Rata hasil ujian justru semakin menurun

4.8. Dampak Bantuan Dana BOS Terhadap Penanggulangan Siswa Drop Out

Siswa drop out atau putus sekolah merupakan permasalahan yang serius menghambat keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pengamatan dalam 3 tahun mulai dari tahun pelajaran 2010/2011 ternyata siswa drop out semakin meningkat. Pada Tahun 2011/2012 di kecamatan sampel yaitu Kecamatan Tanjungterdapat siswa drop out sebanyak 7 orang, Kecamatan Kayangan 1 orang, dan Kecamatan Bayan 5 orang sehingga jumlah semuanya menjadi 13 orang. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 22 orang yaitu Kecamatan Tanjung 6 orang, Kayangan 1 orang, dan Bayan 15 orang.

Sangat diharapkan dengan adanya bantuan dan BOS dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan siswa putus sekolah. Sehingga dapat diharapkan kesuksesan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu perlu pemahaman lebih dalam tentang drop out.

a. Sebab Terjadinya drop Out.

Studi ini memperoleh gambaran sebab-sebab terjadinya siswa drop out cukup bervariasi. Dari hasil wawancara terhadap siswa sebab yang paling banyak terungkap adalah pengalaman siswa yang kurang nyaman di sekolah antara lain, takut kepada guru, dimarah guru, dan perkelahian sesama teman sekolah, kemudian disusul oleh kondisi fisik dan lingkungan anak. Badan siswa yang kecil yang diikuti dengan posisi sekolah yang cukup jauh dan kurang didukung oleh kesadaran keluarga tentang arti penting pendidikan. Lebih jauh lagi kondisi lingkungan yang kurang mendukung adalah kebiasaan buruk perkawinan usia dini terutama anak perempuan dan kesulitan ekonomi keluarga dimana anak berperan menjadi tulang punggung ekonomi. Keseluruhan sebab di atas baik secara sendiri maupun akumulasi mendorong siswa drop out.

b. Upaya Penanggulangan Siswa Drop Out.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah drop out antara lain melalui panggilan terhadap orang tua, membujuk siswa, melibatkan aparat desa, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta melalui bantuan biaya transportasi untuk ke sekolah. Kualifikasi terhadap upaya tersebut adalah tidak pernah, jarang, dan selalu. Tabel berikut menunjukkan pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan tersebut

Tabel 4.23 :Tindakan Sekolah Mengatasi Siswa Drop Out.

No.	Bentuk Tindakan Sekolah	Sekolah yang Melaksanakan (%)		
		Tidak Pernah	Jarang	Selalu
1.	Memanggil Orang Tua	17,6	17,6	64,7
2.	Membujuk siswa	11,8	5,9	82,4
3.	Melibatkan Aparat Desa	52,9	35,3	11,8
4.	Melibatkan Toga Dan Toma	41,2	35,3	23,5
5.	Memberikan Uang Transport Sekolah PP. Untuk Siswa Rumah Jauh	70,6	17,6	11,6

Sumber: Data Primer Diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa melalui bantuan dana BOS semua upaya telah dilaksanakan Yang paling banyak dilaksanakan adalah memanggil orang tua dan membujuk siswa. Sedangkan yang paling sedikit dilaksanakan adalah melibatkan aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta bantuan biaya transportasi. Bila nanti usaha-usaha di atas telah dilaksanakan secara memadai dan sungguh-sungguh diperkirakan angka drop out akan menurun bahkan dapat tidak ada lagi.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan-Simpulan

Berdasarkan hasil study dapat ditarik beberapa simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD/MI dan SMP/MTS dan Madrasah Salafiyah di Kabupaten Lombok Utara telah berjalan sesuai menurut prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. Kekurangan hanya berupa sedikit keterlambatan penerimaan oleh sekolah, terkadang ada guru yang merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan yang dipercaya akan menjadi semakin baik dalam proses pengelolaannya ke depan.
2. Masyarakat orang tua murid sangat merasakan manfaat Bantuan Dana BOS dalam membantu mengurangi beban pembiayaan pendidikan putera puterinya yang terasa sangat berat. Demikian halnya dengan lembaga pendidikan dasar 9 tahun yaitu SD/MI, SMP/MTS, dan Madrasah Salafiyah di Kabupaten Lombok Utara, yang juga merasa sangat terbantu dengan dukungan bantuan pembiayaan dari dana BOS sehingga berbagai program penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sebagaimana diharapkan sehingga dapat diharapkan akan mampu mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Dampak bantuan dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan Madrasah Salafiyah di Kabupaten Lombok Utara hanya tampak pada penyediaan sarana-prasaran dan alat bantu pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidikan, dan pada upaya peningkatan kualitas siswa. Namun dampak bantuan dana BOS belum nampak pada peningkatan kualitas hasil belajar.
4. Dampak bantuan dana BOS terhadap penanggulangan siswa drop out pada SD/MI, SMP/MTs, dan Madrasah Salafiyah dapat dinilai belum nampak. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini.
 - a. Sebab utama siswa drop out tidak hanya pada sisi ekonomi orang tua saja tetapi beberapa sebab lain seperti kebiasaan kurang baik yaitu kawin usia dini, peranan anak sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, kesadaran rendah pada orang tua tentang arti penting pendidikan. Hal lain yang menarik yang menjadi sebab siswa drop out adalah adanya kesan siswa tentang proses pendidikan yang berlangsung di sekolah kurang nyaman, kurang menyenangkan bahkan menakutkan siswa seperti sikap guru yang memarahi siswa, kurangnya pengawasan terhadap siswa sehingga tidak perlu terjadi suasana permusuhan/ perkelahian/ penghinaan antar siswa di sekolah,
 - b. Penanggulangan siswa drop out oleh sekolah perlu lebih sistematis yaitu terprogram, terencana meliputi berbagai usaha dan terutama keterlibatan pihak-pihak yang terkait seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk aparat desa maupun dusun.

5.2. Saran-Saran.

Berdasarkan simpulan study ini maka diajukan beberapa saran kepada pihak yang berkaitan untuk ditindak lanjuti dalam rangka pemanfaatan bantuan dana BOS guna mensukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara khususnya yang membidangi pelaksanaan bantuan dana BOS untuk SD/MI, SMP/MTs dan Madrasah Salafiyah agar melakukan upaya-upaya guna mencegah terjadinya kelambatan penerimaan bantuan oleh sekolah.
2. Kepada para Kepala Sekolah/ Madrasah SD/MI, SMP/MTs, dan Salafiyah dalam mengelola bantuan agar meningkatkan porsi untuk menunjang kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas proses belajar mengajar seperti pengembangan kemampuan guru, melaksanakan penelitian dan penyusunan

karya tulis, proses pembelajaran yang kondusif, menerapkan pembelajaran inovatif terutama metode PAKEM yang dapat mewujudkan suasana belajar yang aman dan menyenangkan.

3. Menyarankan Kepada Kepala Sekolah/ MadrasahSD/MI, SMP/MTs, dan Salafiyah untuk meningkatkan perhatian khusus terhadap penanggulangan siswa drop out terutama yang disebabkan oleh berbagai kebiasaankurang mendukung yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran, terencana, dan sistimatis dan juga melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat terutama aparat pemerintahan desa dan dusun.
4. Disarankan kepada fihak akademisi maupun fihak-fihak lain yang memiliki perhatian terhadap masalah pendidikan untuk menindak lanjuti hasil studii ini pada lingkup yang lebih luas terutama berkaitan dengan upaya penanggulangan siswa drop out.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. et al. (eds), 2007, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Handbook)*, Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Bandung, PT. Imperial Bhakti Utama.
- Anonim, peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan pertanggung Jawaban Program Bantuan Operasional Sekolah tahun 2012.
- Arends, R.I., 1997. *Classroom Instruction And Management*, new York: The Mc Graw Hill Company.
-,2007, *Learning To Teach, Seventh Edition* . New York: The Mc Graw Hill Company.
- Arikunto, S. 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro pusat Statistik, 2010, *Nusa Tenggara Barat dalam angka*.
- Dahar, R.W. 1988, *Teori-Teori Belajar*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan.
- Degeng I N S, 1989, *Teori Pengajaran I: Taksonomi Variabel*, Malang: Program Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Terbuka.
- , 1990. *Teori Pengajaran 2: Terapan* , Malang, Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka.
- Depdiknas, 2006, *Kepmendiknas Nomor 22 Tentang Standar Isi Dan Kompetensi Satuan Pendidikan dasar Dan Menengah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Dinas Pendidikan Pemuda Dan KebudayaanKabupaten Lombok Utara, 2010, Buku Saku Pendidikan Kabupaten Lombok Utara.
- Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010. Buku Saku Pendidikan.
- Dini Irawati, 2013, Standar Pelayanan Minimal Dan Standar Nasional Pendidikan, Sebagai Acuan Mutu pendidikan Di Indonesia, *SubmittedBy Admin On Wed. 02/06/2013-11 : 47*.
- Donna J. Dockery, (Terjemahan Oleh Mukti Asikin), Masalah Putus Sekolah (Drop Out): Indikator, Ternd, Dan Intervensi Bagi konselor Sekolah, *Journal Of School Counseling*, Volume 10, Number 12, 2012.
- Kerlinger, F.N.,1986, *Azaz-Azaz Penelitian Behavioral*, Terjemahan Oleh Simatupang, L.R., 1990, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Margono, 2008, *Hubungan Antara Alokasi Anggaran Pendidikan Dengan Mutu Pendidikan Jenjang SMP(Studi Kasus di SMP Kabupaten Purworejo)*, Yogyakarta: FE UGM.
- Ratih, K., 2013, Mutu Pendidikan Guru Inti Kualitas Pendidikan, [http://www/ mutu pendidikan](http://www/mutu pendidikan), Diunduh, Oktober 2013.
- Santoso, Dwi, 2007, *Kefektifan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam rangka Program Peningkatan Mutu pembelajaran Di SD se kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar* (Abstrak).
- Sudirdjo,S. & Siregar, E. 2008, Media Pengajaran Sebagai Pilihan Dalam SPengajaran. Dalam Prawira Dilaga& Siregar (Eds), *Mozaik TeknologiPengajaran (p.12-13)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. strategi
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Reseach & Development*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Supriadi, D., 2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, Bandung, Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *Guru Dan Dosen* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang, Aneka Ilmu.